

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Instansi : BAPPEDA

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Biodata Pegawai	-UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. UU No. 43 Tahun 1999	- Selama yang bersangkutan menjadi PNS -Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	-Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
2	Daftar Nilai DP3 Pegawai	-PP 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Selama 3 periode penilaian	-Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	-Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) - UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	-Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	-Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

4	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi :</p> <p>1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga (KP4)</p> <p>2. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang</p> <p>a. Dokumen Pertanggung-jawaban Keuangan dan Laporan Keuangan yang belum diaudit</p>	<p>-Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>- Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>-UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. UU No. 43 Tahun 1999</p> <p>- Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>- Kepmendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>-Selama yang bersangkutan menjadi PNS</p> <p>-Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</p> <p>-Sampai audit selesai</p>	<p>-Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia</p> <p>-Belum terjaminnya kebenaran informasi</p>	<p>- Menjaga privasi</p> <p>- Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</p> <p>-Dokumen Pertanggungjawaban dan Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose</p>
	<p>b. Rekening Bank pegawai</p>	<p>-Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>-Selama kode masih digunakan</p>	<p>-Penyalahgunaan oleh Pihak Lain</p>	<p>-Menjaga Keamanan rekening Bank</p>

5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<p>-Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)</p> <p>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</p> <p>- Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)</p>	<p>-Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.</p> <p>-Selama proses pengadaan barang/jasa</p>	<p>-Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>-Perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha</p>
6	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	<p>-Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)</p> <p>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut</p>	<p>- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.</p> <p>-Selama proses pengadaan barang/jasa</p>	<p>-Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>-Perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha</p>

		sifatnya dirahasiakan) - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)			
7	Lokasi Server	UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 2	-Selama digunakan	-Penyalahgunaan oleh Pihak lain	-Melindungi/mengamankan data dan perangkatnya
8	Kode Akses Elektronik	UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 6	-Selama digunakan	-Penyalahgunaan oleh Pihak lain	-Menjaga/melindungi keamanan akses
9	Sistem Manajemen Database	UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 5	-Selama digunakan	-Penyalahgunaan oleh Pihak lain	-Menjaga/melindungi keamanan akses